

## PENGARUH DANA PERIMBANGAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DI PROVINSI JAWA BARAT

*(The Influence of Fiscal Balanced Funds on Economic Growth in the Districts of West Java Province)*

**Mentari Wahyuningsi\* dan Samuel Fery Purba\*\***

\*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti  
Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat, Indonesia  
Email: mentariwahyuningsi@gmail.com

\*\*Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)  
Widya Graha Lt. 4, Jalan Jend. Gatot Soebroto No. 10, Jakarta, Indonesia  
Email: samu003@brin.go.id

Naskah diterima: 17 Oktober 2022  
Naskah direvisi: 17 Desember 2022  
Naskah diterbitkan: 31 Desember 2023

### **Abstract**

*The Government of Indonesia has changed the posture of the 2020 State Budget during the Covid-19. It is planned that the state expenditure budget, which was originally IDR 2.540,4T, will increase to IDR 2.613,8T, including additional spending for handling the Covid-19 of IDR 255.110T. APBN which estimated at IDR 2.233T, has decreased to IDR 1.760T. This study aims to analyze the DAU, DBH, DAOP, DAOK and DD have influence on GRDP per capita in the Districts of West Java Province. The research method is panel data regression analysis, which consists of time series for 2018-2021 and cross-sectional in 16 districts in West Java Province. Secondary data from the DJPK, Ministry of Finance and BPS. The results of this study indicate that the DBH, DAOK, and DD have effects on economic growth in the districts of West Java Province. DAU and DAOP have no effect on economic growth. This condition was affected by the Covid-19, which has changed the posture of the income and expenditure budget in the APBN and 2020 West Java APBD. Some allocation funds, including the DAU, were diverted to DAOK funds for handling Covid-19 so that the spread of the virus does not increase and is under control.*

*Keywords: General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Village Fund, economic growth, Covid-19*

### **Abstrak**

Pemerintah Indonesia telah mengubah postur APBN tahun 2020 pada masa Covid-19, direncanakan Anggaran Pengeluaran Negara yang semula Rp2.540,4T meningkat menjadi Rp2.613,8T, termasuk tambahan belanja untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp255.110T. APBN sebelumnya diperkirakan Rp2.233T mengalami penurunan menjadi Rp1.760T. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh DAU, Dana DBH, Dana Alokasi Operasional Pendidikan (DAOP), Dana Alokasi Operasional Kesehatan (DAOK) dan Dana Desa (DD) terhadap PDRB per kapita kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel, karena data penelitian yang terdiri dari gabungan data data *time series* dan *cross section*, dimana data penelitian menggunakan tahun 2018-2021 dan data *cross-sectional* yaitu pada 16 kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari DJPK, Kementerian Keuangan dan BPS Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DBH, DAOK dan DD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, DAU dan DAOP tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dipengaruhi Covid-19 yang telah mengubah postur anggaran pendapatan dan pengeluaran pada APBN dan APBD Jawa Barat 2020. Beberapa dana alokasi termasuk DAU dialihkan ke dana DAOK untuk penanganan Covid-19, supaya penyebaran virus tersebut tidak meningkat dan terkendali.

Kata kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Desa, pertumbuhan ekonomi, Covid-19

### **PENDAHULUAN**

Di awal tahun 2020 negara-negara di dunia dihadapkan pada permasalahan pandemi Covid-19 yang merupakan penyakit pneumonia baru dari SARS-CoV-2. Wabah ini pertama kali diinformasikan di sekitar Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok pada bulan Desember 2019 (Susilo et al., 2020). Pada awal bulan maret 2020 Covid-19 pertama kali diberitakan di Indonesia dengan dua kasus di Kota Depok (Susilo et al., 2020). Pandemi ini telah menyerang masyarakat Indonesia tanpa melihat status sosial ekonomi dan telah mengubah tatanan kehidupan yang dahulunya bertatap muka menjadi terbatas, daring dan berjaga jarak.

Pemerintah Indonesia juga telah mengubah postur APBN tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19, direncanakan Anggaran Pengeluaran Negara yang semula Rp2.540.4 triliun meningkat menjadi Rp2.613,8 triliun, termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp255.110 triliun. Anggaran Pendapatan Negara yang sebelumnya diperkirakan Rp2.233 triliun mengalami penurunan menjadi Rp1.760 triliun (Kementerian Keuangan, 2020). Perubahan postur APBN 2020 telah mengubah postur APBD 2020 kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Perubahan tersebut terjadi pada postur keuangan daerah, seperti: Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Alokasi Operasional Kesehatan (DAOK), Dana Alokasi Operasional Pendidikan (DAOP), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa (DD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

PDRB per kapita merupakan *proxy* atau indikator terbaik dalam menilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin meningkat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah setiap tahunnya, maka perekonomian daerah tersebut semakin baik dan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Provinsi Jawa Barat memiliki 18 kabupaten dan 9 kota yang tersebar dalam 3.710.061,32 hektar luas daratan dan garis pantainya sepanjang 755.829 km (BPS Provinsi Jawa Barat, 2022a). Bukan hanya itu, PDRB per kapita kabupaten di Provinsi Jawa Barat adalah salah satu PDRB per kapita kategori kabupaten terbesar di Indonesia.

Selama pandemi Covid-19, perubahan postur DAU menurun di setiap kabupaten di Jawa Barat. Padahal, DAU menjadi faktor pendorong kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa DAU memiliki hubungan yang positif dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (AR & Zein, 2016; Fahma & Nuraini, 2017; Mawarni et al., 2013; Mokorowu et al., 2020; Panggabean et al., 2022; Purnomo & Wasiat, 2015; Putrayuda et al., 2017; Sulaiman, 2020; Uhise, 2013; Wahyuni, 2020).

Selain DAU, DBH yang merupakan dana dari APBN yang bertujuan untuk pelaksanaan desentralisasi, mengalami penurunan postur anggaran di setiap daerah kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 dan 2021. Padahal, merujuk Santosa (2013), DBH bernilai positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah di 33 provinsi di Indonesia. Sejalan dengan pernyataan penelitian tersebut, menurut AR & Zein (2016) di Provinsi Aceh, Putrayuda et al. (2017) di Provinsi Riau dan Mokorowu et al. (2020) di Kabupaten Minahasa Tenggara, mengatakan bahwa DBH memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

Peningkatan anggaran DAOK tahun 2020 dan 2021, dimanfaatkan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menjadi fokus dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. DAOK di beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Barat mengalami penambahan dana yang cukup signifikan, untuk mencegah penularan dan menurunkan jumlah kasus positif Covid-19. Merujuk hasil penelitian dari Alexeev & Mamedov (2017), Amir et al. (2019), Dewi & Utama (2021), Mongan (2019) serta Nasution et al. (2021) bahwa pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sektor kesehatan dalam bentuk DAOK memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan negara.

Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan perekonomian suatu negara di masa depan untuk beradaptasi dengan teknologi modern dan pembangunan yang berkelanjutan (Todaro & Smith, 2012). Kebijakan DAOP yang membantu mengurangi kesenjangan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan dan menurunkan angka buta huruf di daerah tidak mengalami peningkatan yang signifikan terhadap anggaran APBD 2020 kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa DAOP memiliki arah positif dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Althofia & Agustina, 2015; Amir et al., 2019; Salsabillah, 2018).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat di biayai oleh dana desa, sehingga mampu meningkatkan perekonomian suatu daerah. Anggaran DD di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan perekonomian dalam berbagai sektor dan merentas kemiskinan di daerah. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa alokasi dana desa bernilai positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan (Abdullah, 2022; Jumiaty & Adam, 2020; Kusdino et al., 2018; Prasetyo & Dinarjito, 2021; Rimawan & Aryani, 2019).

Kelima variabel terbaik dalam menentukan alokasi APBD suatu daerah tersebut relatif belum banyak diteliti secara bersama-sama dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan penelitian ini dilakukan pada masa pandemi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini memiliki perbedaan temuan penelitian (*research gap*) yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yakni dana perimbangan (DAU, DBH, DAOK, DAOP, dan DD) memberikan dampak yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan diperoleh temuan penelitian yang menyatakan sebaliknya. Temuan penelitian lainnya menyatakan bahwa DAU (Astria, 2014; Dewi & Suputra, 2017; Kumala, 2018; Monica & Sa'roni, 2022; Putri, 2016; Rarung, 2016) dan DAOP (Dewi & Utama, 2021; Dewi & Suputra, 2017; Muliza et al., 2017; Nasution et al., 2021) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah.

Dari uraian latar belakang ini, maka tujuan penelitian yaitu mengetahui dan menganalisis pengaruh DAU, DBH, DAOK, DAOP dan DD terhadap PDRB per kapita (proksi pertumbuhan ekonomi) sejak tahun 2018 hingga 2021 serta mengetahui pengaruh hubungan keuangan daerah tersebut pada masa pandemi Covid-19 di kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan model regresi linear dengan analisis data panel, untuk menguji pengaruh ke 5 variabel keuangan daerah terhadap PDRB per kapita kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada masa

pandemi Covid-19. Kelima variabel ini mampu mewakili dana TKDD terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Jawa Barat, sehingga nantinya menjadi suatu pertimbangan dalam menyusun kebijakan publik yang baru bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dapat pemeratakan dana daerah untuk desentralisasi serta meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat di kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

## METODE

### Jenis dan Sumber Data

Sumber data studi ini memakai data sekunder yang bersumber dari Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJKP), Kementerian Keuangan dan PDRB menurut kabupaten/kota di BPS Provinsi Jawa Barat pada 16 kabupaten dari tahun 2018 sampai dengan 2021 di Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan, secara tertinggi dan terendah, tidak diikutsertakan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang dalam penelitian ini. *Software* analisis yang digunakan yaitu *E-views* 9.0. Tabel 1 menunjukkan nama variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data penelitian.

**Tabel 1.** Nama Variabel, Definisi Operasional, Jenis dan Sumber Data Penelitian

No	Nama Variabel	Definisi Operasional	Satuan	Jenis Data	Sumber Data
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	Pengtransferan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten untuk desentralisasi	Rupiah	Kuantitatif	www.djpkd.depkeu.go.id
2.	Dana Bagi Hasil (DBH)	Penerimaan APBN yang di transfer ke daerah dengan presentase tertentu untuk pendanaan desentralisasi	Rupiah	Kuantitatif	www.djpkd.depkeu.go.id
3.	Dana Alokasi Operasional Kesehatan (DAOK)	Dana dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjalankan operasional kesehatan demi tercapainya program kesehatan prioritas nasional	Rupiah	Kuantitatif	www.djpkd.depkeu.go.id
4.	Dana Alokasi Operasional Pendidikan (DAOP)	Dana yang di alokasikan dalam APBN kepada daerah untuk pendanaan biaya operasional pendidikan non personalia melaksanakan program pendidikan sejak usia dini	Rupiah	Kuantitatif	www.djpkd.depkeu.go.id
5.	Dana Desa (DD)	Dana APBN bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten, demi terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa	Rupiah	Kuantitatif	www.djpkd.depkeu.go.id
6.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	PDRB per kapita daerah Kabupaten Provinsi Jawa Barat atas harga konstan. PDRB per kapita merupakan proksi pertumbuhan ekonomi suatu daerah	Rupiah	Kuantitatif	www.jabar.bps.go.id

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2022b dan DJPK, 2022

Penelitian ini menganalisis tentang dana TKDD dengan beberapa variabel dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *regression data panel* untuk melihat 5 variabel independen (bebas), yaitu dana DAU, DBH, DAOK, DAOP, dan DD memengaruhi variabel dependen (terikat) yaitu PDRB per kapita (Gujarati et al., 2017). Data *time series* dari tahun 2018-2021, sedangkan data *cross-sectional* 16 kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka model regresi pada penelitian ini sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DBH_{it} + \beta_3 DAOK_{it} + \beta_4 DAOP_{it} + \beta_5 DD_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots (1)$$

Di mana:

PDRB : PDRB per kapita sebagai Indikator pertumbuhan ekonomi daerah (Rupiah)

$\beta_0$  : konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  : koefisien regresi

DAU : Dana Alokasi Umum (Rupiah)

DBH : Dana Bagi Hasil (Rupiah)

DAOK : Dana Alokasi Khusus non fisik operasional kesehatan (Rupiah)

DAOP : Dana Alokasi Khusus non fisik operasional pendidikan (Rupiah)

DD : Dana Desa (Rupiah)

e : residual atau *error*

i : kabupaten di Jawa Barat  
t : tahun (2018-2021)

Kerangka pemikiran penelitian ini telah divisualkan dalam Gambar 1. Berdasarkan pendahuluan penelitian, teori ilmu ekonomi dan penelitian-penelitian sebelumnya, dirumuskan beberapa hipotesis penelitian ini, antara lain:

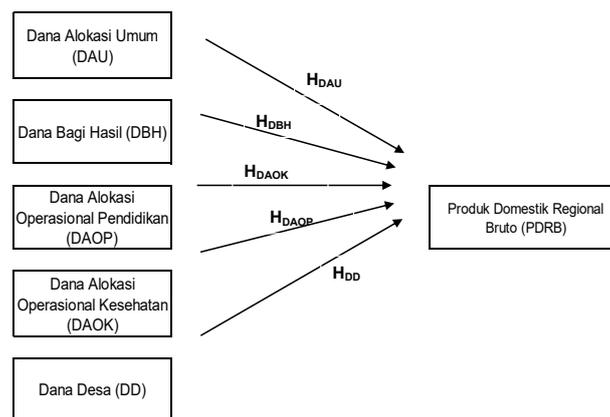
HDAU : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita

HDBH : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita

HDAOK : Dana alokasi operasional khusus kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita

HDAOP : Dana alokasi operasional khusus pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita

HDD : Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita



**Gambar 1.** Kerangka Pemikiran Penelitian

### Metode Analisis

Statistik deskriptif merupakan alat analisis pertama yang digunakan pada penelitian ini tujuannya untuk melihat gambaran umum dari karakteristik setiap variabel penelitian yang ditentukan dari nilai rata-rata (*mean*), nilai tertinggi (maksimum), nilai terendah (minimum) dan standar deviasi. Merujuk Ghazali (2016), analisis statistik deskriptif pada setiap penelitian digunakan untuk memvisualisasikan terkait karakteristik dari sekumpulan data tanpa membuat kesimpulan secara generalisasi. Nilai rata-rata penelitian diperoleh dari penjumlahan semua dana pada masing-masing variabel penelitian (DAU, DBH, DAOK, DAOP, DD, dan PDRB per kapita) dibagi dengan jumlah sampel pada variabel penelitian (jumlah kabupaten dan tahun sampel penelitian). Nilai tertinggi adalah nilai maksimum pada setiap variabel penelitian, sebaliknya nilai terendah adalah nilai minimum pada setiap variabel penelitian.

Alat analisis kedua yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel (*pooled data*). Data panel merupakan data komposit dari data *cross section* dari 16 kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan data *time series* dari tahun 2018-2021 dari BPS dan TKDD. Model data panel digunakan untuk menghasilkan hasil estimasi statistik yang lebih baik dan efisien. Panel berimbang (*balanced panel*) memiliki jumlah observasi *time series* yang sama dengan *cross section*, seperti data dalam penelitian ini.

Metode analisis regresi data panel ada 3 model yaitu model *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Model yang paling sederhana adalah model *common effect* (CEM), yang diestimasi menggunakan *ordinary least square* dengan menggabungkan semua data *cross section* dan *time series*, dengan setiap objek pengamatan diasumsikan memiliki intersep dan *slope* yang sama (Gujarati et al., 2017). Intersep setiap individu diasumsikan berbeda dalam *fixed effect model* (FEM), dan adanya variabel yang tidak semuanya dimasukkan dalam model persamaan memungkinkan terjadinya intersep yang tidak konstan (Gujarati et al., 2017). FEM sering disebut sebagai *least square dummy variable* karena adanya variabel *dummy*. Penambahan variabel *dummy* akan menurunkan efisiensi estimasi parameter yang merupakan kelemahan model ini. Merujuk Gujarati et al. (2017) bahwa model *random effect* dapat mengatasi ketidakpastian dari FEM, dimana *error individual* dan *error* secara agregat diasumsikan tidak berkorelasi.

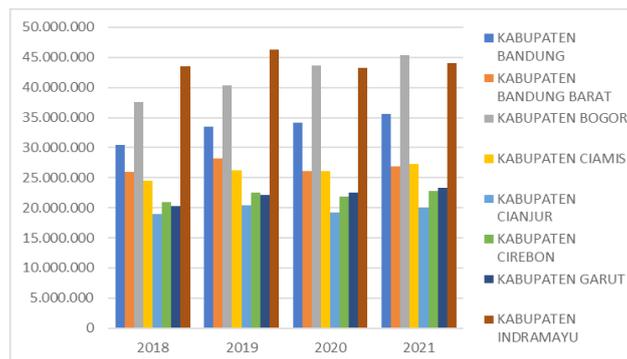
Untuk pengambilan keputusan pemilihan model panel data terbaik, terlebih dahulu model regresi tersebut dilakukan pengujian Uji Chow, Uji Hausman serta Uji LM. Menurut Ghazali (2016) bahwa Uji Chow digunakan untuk memilih kedua model antara CEM dan FEM. Kedua Uji Hausman digunakan untuk memilih model yang akan digunakan antara FEM dan REM. Terakhir, Uji LM digunakan untuk mengidentifikasi model yang akan digunakan

antara CEM dan REM. Uji statistik dalam ekonometrik yang dilakukan adalah dengan uji F-statistik, uji t-statistik dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Uji F-statistik untuk mengetahui apakah masing-masing variabel DAU, DBH, DAOK, DAOP, dan DD dalam penelitian signifikan memengaruhi variabel PDRB. Sedangkan Uji t-statistik untuk mengetahui apakah variabel DAU, DBH, DAOK, DAOP, dan DD dalam secara bersama-sama dan secara signifikan memengaruhi PDRB kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Uji koefisien determinasi untuk mengukur sejauh mana kelima variabel independen (DAU, DBH, DAOK, DAOP, dan DD) mampu menjelaskan variabel dependen (PDRB), dengan nilai antara 0 hingga 1.

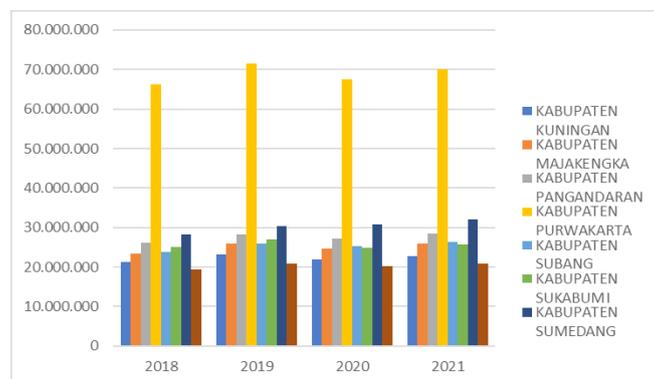
## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data di laman BPS Jawa Barat tahun 2018 hingga 2021 yang disajikan pada Gambar 2 dan 3, bahwa rata-rata pendapatan per kapita (PDRB per kapita) di Provinsi Jawa Barat tertinggi adalah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp71.580.000.000, sedangkan nilai PDRB per kapita terendah sebesar Rp19.009.000.000, di Kabupaten Cianjur tahun 2018.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2022, diolah.

**Gambar 2.** PDRB per Kapita Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Selama Tahun 2018 – 2021 Bagian I



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2022, diolah

**Gambar 3.** PDRB per Kapita Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Selama Tahun 2018 – 2021 Bagian II

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang diolah dengan *E-views 9.0* menunjukkan nilai rata-rata, maksimum, minimum dan standar deviasi dari variabel penelitian yang telah dianalisis. Nilai tertinggi untuk DAU sebesar Rp2,16 miliar di Kabupaten Bandung tahun 2019, sedangkan terendah di Kabupaten Pangandaran tahun 2021 sebesar Rp505,20 juta dengan standar deviasi sebesar Rp382,85 juta, dana DBH memiliki nilai rata-rata penelitian sebesar Rp166,92 miliar dan standar deviasi Rp126,95 miliar, di mana nilai tertinggi senilai Rp719,25 miliar di Kabupaten Bandung tahun 2021 dan terendah senilai Rp61,23 miliar di Kabupaten Pangandaran tahun 2018.

Hasil statistik DAOK menyatakan bahwa nilai rata-rata variabel penelitian sebesar Rp45,95 miliar dan standar deviasi sebesar Rp23,48 miliar, nilai tertinggi dan terendah pada dana tersebut sebesar Rp147,63 miliar (Kabupaten Bogor pada tahun 2021) dan Rp12,66 miliar (Kabupaten Pangandaran pada tahun 2018). Nilai yang cukup besar pada DAOK di setiap Kabupaten di Provinsi Jawa Barat terjadi pada tahun 2020, karena pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk mencegah dan menurunkan kasus Covid-19 yang pada tahun tersebut kasus mengalami peningkatan cukup tinggi.

Pada DAOP nilai dana tertinggi sebesar Rp54,86 miliar di Kabupaten Sukabumi tahun 2021 sedangkan nilai terendah pada Kabupaten Pangandaran tahun 2018 sebesar Rp3,97 miliar. Selanjutnya nilai rata-rata DAOP sebesar Rp24,18 miliar dan standar deviasi sebesar Rp13,17 miliar. Dana desa (DD) di Provinsi Jawa Barat memiliki nilai rata-

rata sebesar Rp309,59 miliar dengan standar deviasi sebesar Rp113,72 miliar, nilai tertinggi terdapat di Kabupaten Bogor tahun 2021 (Rp523,39 miliar) dan nilai terendah di Kabupaten Pangandaran tahun 2018 (Rp78,24 miliar).

Hasil statistik deskriptif ini memperlihatkan terjadi ketimpangan penerimaan dana pada TKDD (DAU, DBH, DAOK, DAOP, dan DD) dan PDRB per kapita di setiap Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang cukup signifikan. Kabupaten Pangandaran memiliki pendapatan pada setiap TKDD yang rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Pemerintah daerah perlu untuk fokus membuat APBD yang berimbang supaya ketimpangan tidak terlalu signifikan terjadi sehingga pembangunan di setiap daerah dapat merata dan layak. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga turut melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dan kebijakan pemerintah terkait penganggaran anggaran tersebut sehingga mengurangi ketimpangan pendanaan setiap daerah. Tabel 2 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif terkait variabel penelitian.

**Tabel 2.** Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (ribu Rupiah)

	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Std. Dev.
PDRB	71.580.000,00	19.009.000,00	30.075.640,63	12.274.998,83
DAU	2.161.680,00	505.200,00	1.339.282,81	382.847,87
DBH	719.250.000,00	61.230.000,00	166.923.437,50	126.954.249,55
DAOK	147.630.000,00	12.660.000,00	45.951.093,75	23.475.465,42
DAOP	54.860.000,00	3.970.000,00	24.183.296,88	13.170.664,45
DD	523.390.000,00	78.240.000,00	309.587.187,50	113.719.971,41

Sumber: Olah Data E-views 9.0.

Analisis data panel dalam penelitian ini telah dilakukan dengan *E-views 9.0*, maka diperoleh data statistik dari ketiga model ekonometrik (Tabel 3). Pengambilan model terbaik tersebut, terlebih dahulu dilakukan pengujian Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM. Hasil pertama dari Uji Chow diperoleh *cross section chi square* sebesar 0,000 di bawah dari nilai  $\alpha$  (5%), maka dilanjutkan dengan Uji Hausman. Uji kedua diperoleh nilai *cross-section random* sebesar 0,113 di bawah dari 0,05, maka dilanjutkan dengan uji terakhir yaitu Uji LM. Hasil pengujian ini diperoleh nilai probabilitas Breusch-pagan sebesar  $0,000 < 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ) maka  $H_0$  ditolak. Model regresi data panel terpilih yaitu REM, untuk pengujian hipotesa dan uji *goodness of fit* akan melihat hasil dari REM. Hasil ketiga model regresi data panel pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Hasil Ketiga Model Regresi Data Panel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Provinsi Jawa Barat

Variabel	Koefisien Regresi		
	CEM	FEM	REM
	42679	20141	23585
DAU	-0.013	0.003	0.001
DBH	0.059	0.011	0.011
DAOK	0.223	0.046	0.048
DAOP	-0.401	-0.057	-0.095
DD	-0.017	0.010	0.009
R <sup>2</sup>	0.275	0.994	0.391
Adj R <sup>2</sup>	0.213	0.991	0.338
F - Statistik	4.404	345.345	7.439
Prob F - Statistik	0.002	0.000	0.000
Chow Test	0.000		
Hausman Test	0.113		
LM Test	0.000		

Sumber: Olah Data E-views 9.0.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen (DAU, DBH, DAOK, DAOP, dan DD) terhadap variabel dependen (PDRB). Berdasarkan hasil estimasi REM dalam Tabel 3 menunjukkan  $R^2$  sebesar 39,1 persen variasi variabel Pendapatan per kapita (PDRB) Kabupaten Jawa Barat dapat dinyatakan oleh variasi variabel DAU, DBH, DAOK, DAOP dan DD. Selanjutnya sisa sebesar 60,9 persen dijelaskan oleh variasi dari variabel lain yang belum dimasukkan dalam model regresi ini. Nilai Uji F yaitu 0,000 di bawah dari 0.05 maka  $H_0$  diterima artinya setidaknya ada satu variabel DAU, DBH, DAOK, DAOP, dan DD yang berpengaruh terhadap variabel

PDRB. Tabel 4 menunjukkan hasil estimasi model REM pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 4.** Hasil Estimasi Model REM PDRB per Kapita Kabupaten di Provinsi Jawa Barat

Independent	Koefisie	Prob	Keputusan
C	23585	0,000	
DAU	0,001	0,578	$H_{DAU}$ ditolak
DBH	0,011	0,000	$H_{DBH}$ diterima
DAOK	0,047	0,009	$H_{DAOK}$ diterima
DAOP	-0,095	0,107	$H_{DAOP}$ ditolak
DD	0,009	0,011	$H_{DD}$ diterima
R <sup>2</sup>	0,391		
Adj. R <sup>2</sup>	0,338		
Prob F-stat	0,000		

Sumber: Olah Data E-views 9.0.

DAU adalah dana bantuan dari pemerintah pusat untuk setiap daerah, yang memperlihatkan posisi kemandirian daerah. Hasil estimasi model REM pada Tabel 4, diketahui besar koefisien DAU senilai 0,001 artinya jika kenaikan DAU sebesar 1 satuan, maka rata-rata PDRB kabupaten di Provinsi Jawa Barat akan turun senilai 0,001, asumsi *ceteris paribus*. Selanjutnya hasil signifikansi dengan nilai probabilitas 0,578 > alpha (5%) maka H<sub>DAU</sub> ditolak. Kesimpulannya bahwa tingkat kepercayaan 95 persen tidak diperoleh pengaruh antara DAU terhadap PDRB. Hal ini semakin tinggi dana DAU maka semakin rendah PDRB Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini berbeda dengan beberapa hasil penelitian yang dikemukakan oleh AR & Zein (2016), Fahma & Nuraini (2017), Mawarni et al. (2013), Mokorowu et al. (2020), Panggabean et al. (2022), Purnomo & Wasiat (2015), Putrayuda et al. (2017), Sulaiman (2020), Uhise (2013), dan Wahyuni (2020) yang menyatakan adanya pengaruh positif dan dan/ atau signifikan antara DAU dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) di daerah. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Astria (2014), Dewi & Suputra (2017), Kumala (2018), Monica & Sa'roni (2022), Putri (2016) serta Rarung (2016) yang menyatakan bahwa penganggaran DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan/atau bernilai negatif terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDRB per kapita secara langsung di daerah.

Perbedaan kondisi hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu tersebut diakibatkan DAU yang diterima kabupaten di Provinsi Jawa Barat besar, namun dalam pemanfaatannya tidak optimal bahkan dalam alokasi belanja modal dan pembangunan infrastruktur masih relatif rendah. Selain itu, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan postur DAU di setiap daerah sebagai upaya efisiensi anggaran pemerintah daerah dan dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19, supaya penyebaran virus tersebut tidak meningkat dan terkendali di setiap daerah. Alokasi belanja daerah pada DAU yang telah direvisi pada tahun tersebut, pemerintah daerah cenderung mempergunakannya untuk urusan khusus pemerintah seperti belanja rutin pegawai dan sebagainya, seharusnya dana alokasi dana tersebut digunakan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat merata dan meningkat. Dampak kondisi dan pemanfaatan DAU yang kurang tepat tersebut mengakibatkan tujuan dan manfaat DAU tidak berpengaruh dan kurang mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil uji ekonometrik diperoleh nilai koefisien DBH sebesar 0,011 yang berarti jika DBH meningkat sebesar 1 satuan, maka rerata PDRB akan meningkat sebesar 0,011, asumsi *ceteris paribus*. Nilai signifikansi pada Tabel 4 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000 di bawah nilai dari alpha, maka H<sub>DBH</sub> diterima. Adanya hubungan positif pada level kepercayaan 95 persen antara DBH terhadap PDRB kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hasil ini diakibatkan adanya peningkatan penerimaan daerah dari pajak seperti PPh, PBB dan BPHTB di daerah tersebut. Penelitian ini searah dengan penelitian Santosa (2013) pada 33 provinsi di Indonesia, AR & Zein (2016) di Provinsi Aceh, Putrayuda et al. (2017) di Provinsi Riau serta Mokorowu et al. (2020) di Kabupaten Minahasa Tenggara yang menyatakan bahwa dana DBH berpengaruh signifikan dan/atau bernilai positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 4 menunjukkan hasil analisis koefisien DAOK sebesar 0,047, dapat diartikan jika DAOK meningkat 1 satuan maka secara rerata PDRB akan meningkat 0,047, asumsi *ceteris paribus*. Nilai signifikansi memperlihatkan nilai probabilitas 0,009 lebih kecil dari alpha (5%) maka H<sub>DAOK</sub> diterima. Hal ini menyatakan bahwa pada tingkat kepercayaan 95 persen terdapat pengaruh DAOK terhadap PDRB. Pemerintah daerah telah memanfaatkan dana DAOK dengan baik untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan kesehatan di setiap daerah. Selanjutnya pada tahun 2020 dan 2021 pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan dana alokasi khusus

operasional kesehatan untuk penanganan Covid-19, sehingga pemerintah daerah memanfaatkan anggaran tersebut untuk meningkatkan pencegahan virus tersebut di kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Hasil analisis ini searah dengan penelitian Alexeev & Mamedov (2017), Amir et al. (2019), Dewi & Utama (2021), Mongan (2019), dan Nasution et al. (2021) yang mengatakan bahwa DAOK bernilai positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan negara. Bahkan menurut Alexeev & Mamedov (2017) dana alokasi khusus pada sektor kesehatan yang diperoleh dari pemerintah pusat dan diberikan kepada pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan PDRB per kapita dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pengujian pada Tabel 4, diketahui besar koefisien DAOP senilai  $-0,095$  yang berarti meningkatnya DAOP pada 1 satuan maka secara rerata PDRB akan turun sebesar  $0,095$ , asumsi *ceteris paribus*. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar  $0,107$  atau lebih besar dari  $\alpha$  (5%), maka HDAOP ditolak. Hal ini menyatakan bahwa pada tingkat kepercayaan 95 persen tidak ada pengaruh DAOP terhadap PDRB kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Althofia & Agustina (2015) di Provinsi Jawa Barat, Salsabillah (2018) di Provinsi Jawa Timur, dan Amir et al. (2019) di Provinsi Sulawesi Selatan, yang menyatakan adanya hubungan positif dengan pengaruh signifikan antara DAOP terhadap PDRB. Tetapi hasil penelitian ini diperkuat dengan beberapa penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Dewi & Utama (2021), Dewi & Suputra (2017), Muliza et al. (2017) serta Nasution et al. (2021) yang menunjukkan bahwa dana DAOP tidak berpengaruh signifikan dan bernilai negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kondisi yang berbeda antara hasil penelitian dengan teori dan beberapa penelitian sebelumnya, dikarenakan DAOP yang diperoleh kabupaten di Provinsi Jawa Barat tidak meningkat secara signifikan (tergolong rendah) dan penggunaannya belum optimal termasuk dalam alokasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya dana DAOP saat kondisi pandemi Covid-19 belum berjalan optimal di daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berfokus pada penanganan pandemi Covid-19 yang semakin meningkat pada tahun 2020 dan 2021. Dana DAOP yang diberikan pemerintah daerah dipergunakan juga untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidikan (SDM) dan siswa-siswi. Peningkatan kualitas SDM pendidikan diharapkan dapat meningkatkan keahlian dalam pemanfaatan teknologi masa depan sehingga nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan serta bersaing dengan negara berkembang dan negara maju di dunia (Todaro & Smith, 2012).

Hasil analisis penelitian ini diperoleh koefisien DD senilai  $0,009$ , yang berarti jika DD meningkat 1 satuan maka secara rerata PDRB akan meningkat sebesar  $0,009$ . Uji signifikansi menyatakan hasil nilai probabilitas sebesar  $0,011$  di bawah dari nilai  $\alpha$  ( $0,05$ ) maka HDD diterima. Kesimpulan statistik mengatakan bahwa pada level kepercayaan 95 persen tidak ada pengaruh DD terhadap PDRB. Hasil ini dikarenakan berhasilnya bantuan pemerintah pusat untuk mendanai program-program pemerintah desa, dalam pelaksanaan pemerataan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hasil ini searah dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu Kusdino et al. (2018) di Provinsi Kalimantan Tengah, Rimawan & Aryani (2019) di Kabupaten Bima, Jumiaty & Adam (2020) di desa di Kabupaten Purwakarta, Prasetyo & Dinarjito (2021) di Indonesia dan Abdullah (2022) di Gorontalo, yang mengatakan bahwa alokasi DD bernilai positif dan berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana DAU dan DAOP bernilai negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dikarenakan pemanfaatan kedua dana tersebut belum optimal bahkan dalam alokasi belanja modal dan pembangunan infrastruktur masih relatif rendah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki fungsi anggaran dan pengawasan terhadap terlaksananya APBN dan kebijakan pemerintah, untuk dapat memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk lebih dahulu meningkatkan efektivitas terhadap pemanfaatan DAU sebelum mengusulkan peningkatan persentase anggaran pendidikan (DAOP) sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembahasan yang diberikan DPR terhadap anggaran dana DAU kepada pemerintah berupa penggunaan alokasi belanja modal dan pembangunan infrastruktur ditingkatkan dan bukan hanya untuk belanja rutin pegawai. Selain itu DPR juga mempertimbangkan RUU terhadap APBN dari pemerintah pusat terkait pendidikan, dengan meningkatkan dana pendidikan (DAOP) sebesar 20 persen terhadap APBN Indonesia, sehingga dapat pemeratakan dan meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah yang bukan peningkatan kuantitas SDM tenaga pendidikan tetapi mampu meningkatkan kualitas SDM dan membangun sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan merata. Selanjutnya DPR melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBN dan beberapa kebijakan pemerintah, supaya penyerapan dana terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga kedepannya pertumbuhan ekonomi daerah dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan melihat pengaruh dana perimbangan (DAU, DBH, DAOK, DAOP, dan DD) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di masa kondisi pandemi Covid-19 di kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa PDRB Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh dana DBH, DAOK dan DD yang memiliki pengaruh positif dan signifikan, berbanding terbalik dengan dana DAU dan DAOP yang terbukti secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB secara langsung di kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Hal ini disebabkan DAU dimanfaatkan pemerintah daerah untuk belanja rutin pegawai dan juga mengalami penurunan bantuan dana dari pemerintah pusat dan dialokasikan lebih besar ke dana alokasi khusus tepatnya operasional kesehatan (DAOK) sedangkan DAOP mengalami penurunan karena kondisi pandemi Covid-19, dana yang diperoleh tidak signifikan dan dialihkan untuk program “kuota internet pelajar dan tenaga pengajar”. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan peningkatan alokasi khusus bidang pendidikan dan belanja modal dan tidak terfokus pada belanja rutin pegawai dan proyek infrastruktur sarana yang besar. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan membangun sarana dan prasarana pada sektor pendidikan yang layak dan merata di daerah, karena pendidikan menjadi sebuah asset bagi masyarakat Indonesia dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedepannya. Hal ini menjadi tantangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, supaya masyarakat sejahtera dan menurunkan tingkat kemiskinan daerah. DPR dapat mengoptimalkan tugas dan wewenangnya terkait dengan fungsi anggaran dalam menyetujui RUU terkait APBN dan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang, anggaran negara, dan kebijakan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23* (3rd ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D., Porter, D., & Gunasekar, S. (2017). *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw Hill Education.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (11th ed.). New York: Pearson.

### Jurnal

- Abdullah, R. (2022). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo. *Jambura : Economic Education Journal*, 4(2), 165–176. <https://doi.org/10.37479/jeej.v4i2.14165>
- Alexeev, M., & Mamedov, A. (2017). Factors determining intra-regional fiscal decentralization in Russia and the US. *Russian Journal of Economics*, 3(4), 425–444. <https://doi.org/10.1016/j.ruje.2017.12.007>
- Althofia, N. Y., & Agustina, N. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2012. *Jurnal Aplikasi Statistika Dan Komputasi Statistik*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.34123/jurnalasks.v7i1.118>
- Amir, I., Zamhuri, M. Y., & Fattah, S. (2019). Analisis Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)*, 15(3), 276–290. <https://doi.org/10.26487/jbmi.v15i3.4817>
- AR, R., & Zein, B. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 213–220.
- Astria, S. A. (2014). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 42–54.
- Dewi, I. G. A. T., & Utama, M. S. (2021). Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 10(9), 3584–3612.

- Dewi, N. W. R., & Suputra, I. D. G. D. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1745–1773.
- Fahma, A. A. P., & Nuraini, I. (2017). Pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 163–175. <https://doi.org/10.22219/jie.v1i2.6076>
- Jumiati, E., & Adam, D. (2020). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Perekonomian Masyarakat, Perluasan Lapangan Kerja dan Peluang Usaha Masyarakat Desa (Studi Deskriptif Korelasi pada 10 Desa di Kabupaten Purwakarta). *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(2), 195–210. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.44>
- Kumala, D. N. C. (2018). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, DAU, DAK, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal (studi kasus pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1–12.
- Kusdino, U., Gohong, G., & Husnataria, F. (2018). Effect of Village Fund Programs on Employment Opportunities, Economic Growth, Poverty Levels, and Equitable Income in Central Kalimantan. *Jurnal Magister Ilmu Ekonomi Universitas Palangka Raya*, 4(2), 75–92.
- Mawarni, Darwanis, & Abdullah, S. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (studi pada kabupaten dan kota di Aceh). *Jurnal Akutansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2(2), 30–37.
- Mokorowu, L. A., Rotinsulu, D. Ch., & Engka, D. S. M. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(4), 81–94. <https://doi.org/10.35794/jpekd.32839.21.4.2020>
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Monica, F., & Sa'roni, C. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010-2019). *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 819–833.
- Muliza, M., Zulham, T., & Seftarita, C. (2017). Analisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 3(1), 51–69. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6993>
- Nasution, D. P., Daulay M. T., & Handani, E. (2021). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 14(1), 33–49.
- Panggabean, H. L., Hariani, D., & B, A. Y. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019. *Owner*, 6(2), 2200–2208. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.836>
- Prasetyo, T. A., & Dinarjito, A. (2021). Analisis pengaruh dana desa dan indeks pembangunan manusia per kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(4), 375–391. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.336>
- Purnomo, A. D., & Wasiat, E. (2015). Pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak. *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 85–98.
- Putrayuda, T. F., Efni, Y., & Kamaliah. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya pada Tingkat Kemiskinan di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 9(3), 198–224.

- Putri, Z. E. (2016). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. *ESENSI*, 5(2). <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2340>
- Rarung, P. (2016). Pengaruh PAD dan DAU terhadap PDRB di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 449–460.
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287–295. <https://doi.org/10.23887/jiah.v9i3.22539>
- Salsabillah, A. (2018). Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus pada Alokasi Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (studi pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2016). *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 3–24.
- Santosa, B. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan daerah terhadap pertumbuhan, pengangguran, dan kemiskinan 33 provinsi di Indonesia. *Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan*, 5(2), 130–143.
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45–45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- Uhise, S. (2013). Dana alokasi umum (dau) pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dengan belanja modal sebagai variabel intervening. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1677–1686. <https://doi.org/10.35794/emba.1.4.2013.3347>
- Wahyuni, S. A. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 20(20), 1–22.

#### Sumber Digital

- BPS Provinsi Jawa Barat. (2022a). Luas Daerah (km<sup>2</sup>), 2019-2022. Diperoleh tanggal 15 Juli 2022, dari <https://jabar.bps.go.id/indicator/153/244/1/luas-daerah.html>
- BPS Provinsi Jawa Barat. (2022b). PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah) 2020-2022. Diperoleh tanggal 15 Juli 2022, dari <https://jabar.bps.go.id/subject/155/pdrb-menurut-kabupaten-kota.html#subjekViewTab3>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). POSTUR TKDD. Diperoleh tanggal 19 Juli 2022 dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd?tahun=2021&provinsi=02&pemda=10>
- Kementerian Keuangan. (2020). Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 di masa Pandemi Covid-19. Diperoleh tanggal 19 Juli 2022, dari <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19>

#### Sumber Lain

- Sulaiman, M. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020, Pontianak.

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**